

Pengaruh belanja tidak langsung terhadap produk domestik regional bruto

Abdul rajab

Universitas Muhammadiyah, Mamuju.

rajab.daeng@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh belanja tidak langsung terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kabupaten Mamuju. metode pengumpulan data dilakukan lewat dokumentasi, interviu dan analisa langsung yang diperoleh melalui kunjungan langsung dengan membawa surat iziin penelitian ke instansi yang berhubungan dengan penelitian ini yang akan diteliti dalam hal ini kantor badan pusat statistik kabupaten Mamuju. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Tidak Langsung (X) berpengaruh positif terhadap Produk domestik regional Bruto (Y) dengan total pengaruh sebesar 70.3 %. Dan kesimpulan pada penelitian ini terdapat pengaruh Belanja Tidak Langsung (X) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y)

Kata kunci: Belanja tidak langsung; produk domestick regional bruto

Pengaruh belanja tidak langsung terhadap produk domestik regional bruto

Abstract

The purpose of this research is to find out how the indirect expenditure influences the Gross Regional Domestic Product (GRDP) in Mamuju district. the method of data collection is done through documentation, interviews and direct analysis obtained through direct visits by bringing a research permit to the agency related to this research which will be investigated in this case the Mamuju district statistical center office. The results showed that indirect spending (X) had a positive effect on Gross Regional Domestic Product (Y) with a total effect of 70.3%. And the conclusion in this study is that there is an effect of Indirect Spending (X) on Gross Regional Domestic Product (Y)

Key words: *Indirect shopping; gross regional domestic product*

PENDAHULUAN

Setiap pemerintah yang ada baik pemerintahan pusat maupun daerah selalu melakukan berbagai jenis belanja sebagai wujud dari keberadaan pemerintahan yang berfungsi untuk menjalankan roda pemerintahan. Pembelanjaan yang dilaksanakan dalam bentuk pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan tentunya untuk membiayai administrasi pemerintah, pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan pembiayaan untuk keamanan Negara. Untuk itu, pemerintah punya kewajiban mutlak dalam pemanfaatan dan pengoptimalan untuk mengumpulkan dan menampung sumber-sumber dana untuk membiayai seluruh pengeluaran yang akan dilakukan oleh daerah yang tentu saja pengeluaran ini tujuannya adalah untuk pembangunan ekonomi yang ada di daerah.

Untuk peningkatan kesejahteraan rakyat salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui pembangunan peningkatan ekonomi baik dalam tingkat pemerintah daerah maupun pemerintahan pusat. Adapun menurut Todaro dan Smith (2011:15) dimana mereka mengemukakan bahwa "Pembangunan yang akan dilaksanakan pada suatu Negara pada hakikatnya Akan dijelaskan dengan tiga hal pokok yaitu: dengan memperhatikan tingkat ketersediaan penyaluran kebutuhan pokok untuk rakyat dalam suatu Negara, serta memperhatikan dari segi kesejahteraan masyarakat sehingga dapat meningkatkan daya kemampuan rakyat disuatu negara dalam memperoleh kegiatan ekonomi yang akan mempermudah dalam memenuhi kebutuhannya serta terciptanya aktivitas sosial dalam kehidupan yang kondusif".

Pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Sukirno (2012:423) dapat dijelaskan bahwa sebagai penanda untuk mengukur presentasi kemajuan moneter suatu negara sesekali, dimana dalam ekonomi asli perkembangan keuangan adalah peningkatan penciptaan kedua tenaga kerja dan produk-produk yang terdapat di suatu negara yang mengandung ekspansi dalam ukuran penciptaan barang modern, peningkatan jumlah sekolah, perbaikan pondasi, perluasan wilayah bantuan penciptaan dan selanjutnya pengembangan dalam penciptaan barang dagangan modal sebagai ". Peningkatan penciptaan tenaga kerja dan produk disebabkan oleh perluasan faktor-faktor penciptaan baik dalam memperluas sifat tenaga kerja dan produk dan memperluas kuantitas tenaga kerja dan produk. Kenaikan gaji individu akan memberdayakan peningkatan di bidang penciptaan Proses pemerintahan Daerah mulai dari tingkat pemerintahan pusat provinsi atau pemerintahan kabupaten/kota pada dasarnya undang-undang dikeluarkan tentang otonomi daerah dimana undang-undang tersebut memasuki era baru sebagaimana isi dari undang-undang nomor 23 tahun 2014 mengenai pemerintah daerah dijelaskan bahwa dalam undang-undang yang mengatur tentang pemabagian kekuasaan suatu Negara dimana pemerintah pusat atau pemerintah provinsi dan pemerintah daerah sangat berperan penting dalam pembangunan daerah. Dengan diterapkannya otonomi daerah tersebut maka didalam suatu otonomi pemerintahan diharapkan mampu dari segala segi aspek pembiayaan pelaksanaan kegiatan dan pembangunan daerah melalui peningkatan pembelanjaan keuangan sehingga pemerintah daerah tidak terlalu mengahapkan di pemerintahan pusat dapat berkurang.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Mankiw (2012, 76) dimana kemukakan bahwa "Pertumbuhan ekonomi selalu memperlihatkan sejauh mana kegiatan perekonomian pasti akan mengalami penambahan pendapatan disetiap periode waktu yang akan datang, adapun indikator yang akan dipakai dalam mengetahui bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu Negara ialah besarnya pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) selain itu untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah dengan cara menggunakan Produk Domestik Regional Bruto ". Sedangkan menurut Sukirno (2012:61) Dalam sebuah Negara Produk domestik bruto (PDB) yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan disebuah Negara dengan tahun tertentu dengan factor produksi yang dihasilkan oleh rakyat di Negaranya serta masyarakat di Negara-negara lain. Dari teori diatas dapat dijelaskan bahwa factor-faktor produksi itu sangat besar pengaruhnya dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto semakin tinggi permintaan barang dan jasa maka semakin tinggi juga factor-faktot produksi.

Secama geogratis daerah Kabupaten Mamuju yang menjadi bagian deri provinsi Sulawesi Barat merupakan daerah yang strategis dimana didalamnya terdapat beberapa sarana penunjang perekonomian diantaranya keberadaan kantor pemerintahan Provinsi, terdapatnya sarana transportasi darat, laut dan udara yang memudahkan dalam kegiatan perekonomian baik mengirim barang maupun yang menerima barang kebutuhan masyarakat, sehingga dengan adanya fasilitas penunjang

dalam perekonomian ini maka tentu diharapkan dapat memberikan dampak yang baik utamanya dalam peningkatan pertumbuhan ekonom.

Dalam sistem pemerintahan otonomi daerah dimana segala pembiayaan daerah penggunaannya diatur oleh daerah itu sendiri salah satu pengeluaran daerah yaitu melalui belanja yang tidak langsung yang terdiri dari belanja untuk pegawai, belanja untuk bunga, belanja untuk subsidi, belanja untuk hibah dan belanja untuk bantuan sosial.

Dengan adanya belanja tidak langsung ini, tentu saja dari sisi pendapatan dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yang tentunya akan mendorong meningkatnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu. Dengan kondisi ini produsen barang dan jasa harus merespon dengan cepat dengan menyediakan ataupun menambah produksi barang dan jasa sebagai akibat dari tingginya permintaan masyarakat.

Tinjauan Pustaka

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Kuznet dalam Jhigan (2010:57) dalam “kuliahnya pada waktu perayaan nobel memberikan penjelasan mengenai pertumbuhan ekonomi yaitu peningkatan suatu Negara yang memiliki tingkat kenaikan jangka panjang dengan mengadakan lebih banyak aneka ragam produk. Produk ekonomi kepada rakyatnya potensi kemajuan teknologi yang ada di Negara tersebut akan berkembang. Selain itu kesesuaian kelembagaan dan ideologis juga dibutuhkan. “ Penjelasan itu juga mempunyai 3 (tiga) komponen dimana yang pertama menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi disebut Negara itu tampak melalui peningkatan stok barang yang tidak ada henti-hentinya, yang kedua menyatakan bahwa kemajuan teknologi perwujudan dalam sebuah pertumbuhan ekonomi baik yang paling menentukan ialah tingkat pertumbuhan ekonomi, keahlian dari berbagai macam barang kebutuhan kepada rakyat, dan yang ketiga menyatakan bahwa dengan memanfaatkan ilmu teknologi secara keseluruhan dan tepat membutuhkan berbagai penyesuaian dibidang kelembagaan serta ideology kemudian penemuan baru akan didapatkan melalui kemampuan manusia dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan serta adanya dukungan dari pemerintah di suatu Negara sehingga Negara dapat maju.

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal pengaturan keuangan negara melalui anggaran pemasukan maupun pengeluaran negara yang biasa dilaksanakan oleh pemerintah. Kebijakan ini sangatlah penting dan fatal sebab besar maupun kecilnya belanja maupun pengeluaran negara itu tergantung dari bagaimana kebijakan fiskal itu sendiri.

Setiap pemerintahan yang ada tentu menginginkan adanya anggaran yang besar yang bisa dikelola oleh pemerintah setempat, sebab semakin besar anggaran yang dikelola maka semakin besar pula pembiayaan dalam pembangunan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah begitu juga sebaliknya jika anggaran belanja yang dikelola oleh pemerintah kecil maka semakin sedikit pula pembiayaan pembangunan yang bisa dilaksanakan. Setiap negara anggaran pembangunannya sangat tergantung dari kebijakan fiskal yang diterapkan dalam negara masing-masing, semakin kuat dan besarnya pengaruh kebijakan fiskal yang ada maka akan semakin mempengaruhi jumlah pendapatan negara yang bisa dikelola, namun kadang bagi negara yang sedang berkembang sangat sulit untuk mencapai maksimal pendapatan negara melalui kebijakan fiskal tersebut, sebab kadang kala kesadaran masyarakat yang kadang kurang mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Belanja Tidak Langsung

Mengingat Pedoman peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Moneter Teritorial dimana Rencana Penggunaan Konsumsi Berbentuk tidak lugas diidentikkan dengan pelaksanaan proyek dan latihan yang dilakukan di daerah tersebut. Kemudian, kelompok Konsumsi Berkelanjutan terdiri dari: Penggunaan tenaga kerja, bunga, sponsor, penghargaan, bantuan sosial, pembagian penggunaan, bantuan moneter, dan penggunaan tiba-tiba.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijelaskan diatas terkait dengan kelompok belanja tidak langsung, maka segala bentuk belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sangat diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan masyarakat maka tentu saja akan semakin memberikan peluang kepada pihak produsen untuk meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut sjafrizal (2016:181) menjelaskan bahwa “Pada dasarnya, PDRB Provinsi Neto adalah informasi dan data penting tentang pelaksanaan keuangan suatu kabupaten dalam periode tertentu”. Secara konklusif, PDRB pada dasarnya adalah jumlah perkiraan tenaga kerja dan produk yang dibuat dalam suatu ruang di masa tertentu. Ahkri sampai akhir-akhir ini, informasi PDRB sudah dapat diakses hampir di semua daerah, yang tersebar di seluruh wilayah / perkotaan di Indonesia, tentunya yang disalurkan setiap tahun melalui kantor focal terukur setiap kecamatan. Penataan yang diidentikkan dengan perekonomian daerah, seperti pembangunan perekonomian daerah, pembangunan keuangan provinsi dan proporsi bantuan pemerintah teritorial, yang untuk menghitungnya menggunakan informasi dari PDRB sebagai data fundamental.

METODE

Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, adapun yang menjadi metode pengumpulan datanya dilakukan lewat dokumentasi, interviu dan analisa langsung yang diperoleh melalui kunjungan langsung dengan membawa surat iziin penelitian ke instansi yang berhubungan dengan penelitian ini yang akan diteliti dalam hal ini kantor badan pusat statistik kabupaten Mamuju.

Metode Analisis

Adapun metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pemeriksaan kuantitatif, dimana teknik ini menggunakan metode pemeriksaan kambuh dasar. Penyelidikan informasi dilakukan dengan menguji informasi variabel secara terukur yang telah dikumpulkan dengan bantuan program *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) 22. Hasil pemeriksaan diandalkan untuk digunakan untuk menentukan dampak dari beberapa faktor otonom pada variabel yang membutuhkan.

Persamaan Regresi Sederhana

Menurut Suliyanto (2011: 39) menyatakan bahwa “regresi sederhana digunakan untuk menganalisis hubungan keterkaitan satu variabel bebas terhadap variabel terikat”. Model persamaan regresi yang digunakan untuk melakukan analisis regresi linier sederhana yaitu sebagai berikut ini:

$$Y = a + bx$$

Keterangan:

Y = nilai yang diramalkan

a = konstanta/intercept

b = koefisien regresi/slope

X = Variabel bebas

Definisi Operasional

Pada penelitian ini menggunakan satu variabel bebas (x) dan variabel terikat (Y). Adapun definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini, yaitu:

Belanja tidak langsung (X) adalah penggunaan terencana tidak secara langsung diidentikkan dengan pelaksanaan proyek dan latihan yang dilakukan oleh kabupaten. Kemudian, kelompok Penggunaan terdiri dari: Konsumsi tenaga kerja, bunga, alokasi, penghargaan, bantuan sosial, pembagian penggunaan, bantuan moneter, dan penggunaan yang mengejutkan; dan

PDRB atau variabel (Y) adalah informasi dan data mendasar tentang pelaksanaan moneter suatu ruang dalam periode tertentu. Secara otoritatif, PDRB pada dasarnya adalah jumlah estimasi tenaga kerja dan produk yang dikirim dalam suatu ruang dalam periode tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk Domestik Regional Bruto

Untuk mengukur sejauh mana tingkat perekonomian suatu daerah maka dapat dilihat dari tingkat PDRB nya, apakah semakin tahun semakin meningkat atau mengalami penurunan serta statnan. PDRB merupakan semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya berikut ini data PDRB pada kabupaten Mamuju.

Tabel 1.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mamuju 2010-2019 (Juta Rupiah)

No	Tahun	Nilai PDRB
1	2010	4.164.029,98
2	2011	4.637.587,64
3	2012	5.097.710,14
4	2013	5.528.210,66
5	2014	6.012.402,70
6	2015	6.469.545,89
7	2016	6.974.983,10
8	2017	7.470.709,96
9	2018	7.921.239,36
10	2019	8.360.314,79

Berdasarkan data pada tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa Produk Domestik Regional Bruto PDRB Kabupaten Mamuju dari tahun 2010-2019 mengalami kenaikan setiap tahun,,hal ini dapat dilihat dimana pada tahun 2010 Produk Domestik Regional Bruto PDRB menjadi Rp. 4.164.029,98. Ditahun berikutnya mengalami kenaikan dimana pada tahun 2011 Produk Domestik Regional Bruto PDRB menjadi Rp. 4.637.587,64. Pada tahun 2012 Produk Domestik Regional Bruto PDRB mengalami kenaikan menjadi Rp. 5.097.710,14. Pada tahun 2013 Produk Domestik Regional Bruto PDRB mengalami kenaikan menjadi Rp. 5.528.210,66. Pada tahun 2014 Produk Domestik Regional Bruto PDRB mengalami kenaikan menjadi Rp. 6.012.402,70. Kemudian pada tahun 2015 Produk Domestik Regional Bruto PDRB menjadi Rp. 6.469.545,89 dan pada tahun 2016 Produk Domestik Regional Bruto PDRB mengalami kenaikan menjadi Rp 6.974.983,10. Pada tahun 2017 Produk Domestik Regional Bruto PDRB mengalami kenaikan menjadi Rp. 7.470.709,96. Pada tahun 2018 Produk Domestik Regional Bruto PDRB mengalami kenaikan menjadi Rp. 7.921.239,36. Dan tahun 2019 ini Produk Domestik Regional Bruto PDRB mengalami kenaikan menjadi Rp. 8.360.314,79. Jadi dapat dilihat setiap tahunnya Produk Domestik Regional Bruto PDRB di Kabupaten Mamuju mengalami keanaikan.

Belanja Tidak langsung

Belanja tidak langsung ialah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam menjalankan fungsinya, semakin besar belanja langsung yang dianggarkan oleh pemerintah daerah tentu akan semakin bagus bagi kegiatan perekonomian yang ada karena akan membuat semakin banyak uang yang dapat diperoleh oleh masyarakat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Berikut ini adalah tabel belanja tidak langsung Kabupaten Mamuju yang diperoleh dari tahun 2010-2019.

Tabel 2.

Belanja Tidak Langsung di Kabupaten Mamuju 2010-2019
(ribu rupiah)

No	Tahun	Belanja Tidak Langsung
1	2010	424.560.347
2	2011	478.209.747
3	2012	359.542.873
4	2013	423.102.949
5	2014	373.208.117
6	2015	471.066.251
7	2016	684.775.375
8	2017	796.605.238
9	2018	723.651.017
10	2019	746.655.914

Berdasarkan data pada tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa Belanja Tidak Langsung dari tahun 2010-2019 mengalami fluktuasi atau naik turun, hal ini dapat dilihat dimana pada tahun 2010 dimana belanja tidak langsung menjadi Rp. 424.560.347, dan pada tahun 2011 belanja tidak langsung mengalami kenaikan menjadi Rp. 478.209.747, kemudian pada tahun 2012 belanja tidak langsung mengalami penurunan Rp. 359.542.873. pada tahun 2013 belanja tidak langsung lagi mengalami kenaikan menjadi Rp. 423.102.949. kemudian pada tahun 2014 belanja tidak langsung penurunan menjadi Rp. 373.208.117. dan ditahun 2015 belanja tidak langsung mengalami kenaikan menjadi Rp. 471.066.251. begitu pula pda tahun 2016 belnja tidak langsung mngalami kenaikan menjadi Rp. 684.775.375. dan ditahun 2017 belanja tidak langsung mengalami kenaikan menjadi Rp. 684.775.375. Pada tahun 2018 belanja tidak langsung mengalami penurunan menjadi Rp. 723.651.017. dan terakhir pada tahun 2019 belanja tidak langsung mngalami kenaikan menjadi Rp. 746.655.914. jadi disini dapat dilihat belanja tidak langsung pemerintahan Kabupaten Mamuju selama 10 tahun terakhir mengalami kondisi kadang naik kadang turun hal ini bias saja terjadi karna pemerintah daerah didalam melakukan alokasi belanja juga menyesuaikan kondisi pendapatn daerah itu sendiri, karna belanja daerah itu sangat tergantung dari pendapatan daerahnya, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh maka semakin tinggi juga alokasi belanja daerah yang akan direncanakan sebagai bentuk dari keberadaan pemerintah daerah. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah daerah memaksimalkan didalam pengelolaan sumber-sumber potensi pendapatan daerah agar mampu meningkatkan pendapatan daerah.

Analisis Data dan Pembahasan Hasil Penelitian

Sebelum melakukan uji analisis menggunakan bantuan program spss maka terlebih dahulu peneliti menampilkan data-data belanja tidak langsung dan data mengenai produk domestik regional bruto yang akan menjadi dasar pengolah data sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 3.

Rekap Data Belanja Tidak Langsung Dan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mamuju Tahun 2010-2019

Tahun	Belanja Tidak langsung (x) (Ribu Rupiah)	PDRB (Y) (Juta Rupiah)
2010	424.560.347	4.164.029,98
2011	478.209.747	4.637.587,64
2012	359.542.873	5.097.710,14
2013	423.102.949	5.528.210,66
2014	373.208.117	6.012.402,70
2015	471.066.251	6.469.545,89
2016	684.775.375	6.974.983,10
2017	796.605.238	7.470.709,96
2018	723.651.017	7.921.239,36
2019	746.655.914	8.360.314,79

Untuk memudahkan peneliti dalam mengolah data yang diperoleh maka dibuat rekap data baik nilai data belanja tidak langsung dan produk domestik regional bruto sebagaimana yang ada pada tabel 7 diatas yang kemudian akan dijadikan sebagai data dasar untuk diolah lebih lanjut yang hasil dari olah data tersebut akan diinterpretasikan oleh peneliti.

Tabel 4.

Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	241.03	922.104		2.614	.031
	X	.007	.002	.839	4.355	.002

a. Dependent Variable: Y

Secara umum rumus persamaan regresi sederhana adalah $Y = a + bx$. Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel 8 diatas maka nilai koefisien regresi dapat dijelaskan sebagai berikut:

a = angka konstan dari unstandardized coefficients. Dalam penelitian ini nilainya sebesar 241.03. angka ini merupakan nilai konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada Belanja Tidak Langsung

(X) terhadap variabel dependen maka akan diperoleh nilai konstan Produk Domestik Regional Bruto (Y) adalah sebesar 241.03; dan

b = angka koefisien regresi. Nilainya sebesar 0.007. angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan Rp. 1 tingkat nilai yang diberikan oleh Belanja Tidak Langsung (X), maka Produk Domestik Regional Bruto (Y), akan meningkat sebesar 0.007 karna nilai koefisien Belanja Tidak Langsung yang diperoleh pada penelitian ini bernilai positif (+), maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa Belanja tidak langsung (X) berpengaruh positif terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (Y). Sehingga persamaan regresinya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = 241.03 + 0.007 X$$

Setelah diperoleh nilai koefisien regresinya serta penjelasan dan penulisan persamaan regresi linear sederhananya maka kita akan melihat uji hipotesisnya. Uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Untuk memastikan apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak (dalam arti variabel X berpengaruh terhadap variabel Y) kita dapat melakukan uji hipotesis ini dengan cara membandingkan nilai signifikan (Sig.) dengan probabilitas 0,05 atau dengan cara lain yakni membandingkan nilai t hitung dengan t tabel.

Uji Hipotesis Dengan Membandingkan Nilai Sig Dengan 0.05

Adapun yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam analisis regresi dengan melihat nilai signifikan (Sig.) hasil output SPSS adalah:

Jika nilai signifikan (Sig.) lebih kecil < dari probabilitas 0.05 mengandung arti bahwa jika ada pengaruh Belanja Tidak Langsung (X) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y); dan Sebaliknya, jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar > dari probabilitas 0,05 mengandung arti bahwa tidak ada pengaruh Belanja Tidak Langsung (X) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y).

Berdasarkan output pada tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikansi (Sig.) yang diperoleh sebesar 0.002 lebih kecil dari < Probabilitas 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, yang berarti bahwa “Ada pengaruh Belanja Tidak Langsung (X) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y)”

Uji Hipotesis Membandingkan Nilai T Hitung Dengan T Tabel

Pengujian hipotesis selanjutnya yaitu dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel, uji ini sering disebut juga dengan uji t , dimana dasar pengambilan keputusan dalam uji t adalah sebagai berikut:

Jika nilai t hitung lebih besar > dari tabel maka ada pengaruh Belanja Tidak Langsung (X) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y); dan Sebaliknya, jika nilai t hitung lebih kecil < dari t tabel maka tidak ada pengaruh Belanja tidak Langsung (X) terhadap Produk Domestik regional Bruto (Y)

Berdasarkan output pada tabel diatas diketahui nilai t hitung sebesar 4.355. karena nilai t hitung sudah ditemukan, maka langkah selanjutnya kita akan mencari nilai t tabel. Adapun rumus dalam mencari t tabel adalah:

$$\text{Nilai } \alpha / 2 = 0.05 / 2 = 0.025$$

$$\text{Derajat kebebasan (df)} = n-2 = 10-2 = 8$$

Jadi nilai t tabel dapat dicari dengan melihat nilai 0.025; 8 kemudian kita lihat pada distribusi nilai t tabel, maka didapat nilai t tabel sebesar 2.306

Karna nilai t hitung yang diperoleh sebesar 4.355 yang lebih besar dari > t tabel 2.306, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, yang berarti bahwa “Ada pengaruh Belanja Tidak Langsung (X) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y)”.

Melihat Besarnya Pengaruh Variabel X Terhadap Y

Untuk mengetahui besarnya pengaruh Belanja Tidak Langsung (X) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y) dalam analisis regresi linear sederhana, kita dapat berpedoman pada nilai R Square atau R^2 yang terdapat pada output SPSS bagian Model Summary pada tabel berikut ini:

Tabel 5.
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.839 ^a	.703	.666	820761.66026

a. Predictors: (Constant), X

Dari output SPSS pada tabel diatas diketahui nilai R Square sebesar 0.703. nilai ini mengandung arti bahwa pengaruh Belanja Tidak Langsung (X) terhadap Produk Domestik regional Bruto (Y) adalah sebesar 70.3 % sedangkan terdapat 29.7 % pengaruh terhadap produk domestik regional bruto yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil uji analisis yang dilakukan dengan merujuk pada pembahasan diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa “Belanja Tidak Langsung (X) berpengaruh positif terhadap Produk domestik regional Bruto (Y) dengan total pengaruh sebesar 70.3 %. Untuk tingkat signifikansi dengan probabilitas 0.05 didapatkan bahwa nilai signifikansi (Sig.) yang diperoleh sebesar 0.002 lebih kecil dari < Probabilitas 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, yang berarti bahwa “Ada pengaruh Belanja Tidak Langsung (X) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y)”, sedangkan mencari nilai signifikan melalui uji t maka diperoleh nilai t hitung sebesar 4.355 yang lebih besar dari > t tabel 2.306, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, yang berarti bahwa “Ada pengaruh Belanja Tidak Langsung (X) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y)”. hal ini disebabkan karna belanja tidak langsung didalamnya terdapat alokasi belanja untuk belanja pegawai yang secara langsung pendapatan pegawai tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Semakin meningkat pendapatan pegawai maka belanja kebutuhannya juga akan meningkat yang akan berdampak terhadap peningkatan produk domestik regional bruto.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil uji analisis yang dilakukan dengan merujuk pada pembahasan pada bab IV diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa “Belanja Tidak Langsung (X) berpengaruh positif terhadap Produk domestik regional Bruto (Y) dengan total pengaruh sebesar 70.3 %. Untuk tingkat signifikansi dengan probabilitas 0.05 didapatkan bahwa nilai signifikansi (Sig.) yang diperoleh sebesar 0.002 lebih kecil dari < Probabilitas 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, yang berarti bahwa “Ada pengaruh Belanja Tidak Langsung (X) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y)”, sedangkan mencari nilai signifikan melalui uji t maka diperoleh nilai t hitung sebesar 4.355 yang lebih besar dari > t tabel 2.306, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, yang berarti bahwa “Ada pengaruh Belanja Tidak Langsung (X) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y)”.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju. 2020. Kabupaten Mamuju Dalam Angka 2020. BPS. Mamuju.
- Jhingan, M.L. 2010. Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- LP3M STIE Muhammadiyah Mamuju. 2015. Buku panduan Penulisan Proposal Penelitian Dan Skripsi. STIE Muhammadiyah Mamuju. Mamuju
- Machmud, Amir. 2016. Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi. Erlangga. Jakarta.
- Mankiw, N. Gregory., Quah, Euston., dan Wilson, Peter. 2012. Pengantar Ekonomi Makro: *Principles of Economics An Asian Edition* (Volume 2) (Alih Bahasa: Biro Bahasa Alkemis).Salemba Empat. Jakarta:
-2014. Pengantar Ekonomi Makro. Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Salvtore, Domenick. 2017. Ekonomi Internasional. Salemba Empat. Jakarta Selatan.

- Sjafrizal. 2016. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonom. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Subandi. 2016. Ekonomi pembangunan. Alfabeta. Bandung.
- Sukirno, Sadono 2012. Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suliyanto. 2011. Ekonometrika Terapan Teori Dan Aplikasi Dengan SPSS. Andi. Yogyakarta.
- Tarigan, Robinson. 2012. Ekonomi Regional Teori Dan Aplikasi. Bumi Aksara. Jakarta.
- Todaro, M.P. dan Stephen C. Smith. 2011. Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan. Jakarta: Erlangga.